



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 20/TM/PP/ADM/PROV/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: AWANUL MUKHRIS, S.Ag
No.KTP	: 3575010706750001
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Panglima Sudirman No.47, Kota Pasuruan
Tempat, Tanggal Lahir	: Pasuruan, 07 Juni 1975
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kota Pasuruan



MELAPORKAN

Nama : SOIBATUS SALAMIYA

Alamat :Jl. Gatot Subroto, RT 1 RW 7, Gandingrejo, Kota Pasuruan
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Sekretaris Partai PSI Kota Pasuruan,

dengan laporan bertanggal 11 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 20/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1) Uraian Laporan Pelapor

Pada hari Rabu, Tanggal 2 Januari Tahun 2019, berdasarkan tahapan kampanye pemilu tahun 2019 Bawaslu Kota Pasuruan telah melakukan pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di KPU Kota Pasuruan Jl.R. Sudrasono No. 01 Bangil - Pasuruan. PSI tidak menyerahkan LPSDK kepada KPU Kota Pasuruan sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 2 Januari 2019 sampai pukul 24.00 WIB

2) Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P1	Dokumen Laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor : 1/PL.06.1-Pu/3575/KPU-Kot/I/2019
2	P2	Dokumen Berita Acara Hasil Klarifikasi keterlambatan pembukaan Rekening Khusus Dana kampanye (RKDK) dan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye LADK Peserta Pemilu 2019 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Pasuruan Nomor 1132/PL.01.6-BA/3575/KPU-Kot/IX/2018



3) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

- 1) Saksi 1 atas nama TITIN YULINARWATI, S.SI, anggota Bawaslu KotaPasuruan, alamat Panglima Sudirman Nomor 47 Kota Pasuruan, menerangkan sebagai berikut :



- a. Saksi 1 melakukan kegiatan pengawasan di kantor KPU Kota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No.119 A, Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
 - b. Dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB terdapat 14 Parpol dan 2 tim kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah mengirimkan berkas LPSDK ke Kantor KPU Kota Pasuruan.
 - c. Bahwa KPU Kota Pasuruan telah melakukan sosialisasi terkait dengan openyerahan batas akhir LPSDK dimaksud kepada Parpol yang menjadi peserta Pemilu tahun 2019 tersebut dan Partai Garuda tidak hadir pada saat sosialisasi tersebut.
 - d. telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.
 - e. Dari pihak KPU Kota Pasuruan telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 - f. Bahwa KPU Kota Pasuruan telah melakukan sosialisasi dan menghubungi tim kampanye Partai Garuda pada saat-saat terakhir penyerahan LPSDK.
- 2) Saksi 2 atas nama MOH. ANAS, S.SOS, M.SI pekerjaan Anggota Bawaslu Kota Pasuruan alamat Panglima Sudirman Nomor 47 Kota Pasuruan menerangkan sebagai berikut :
- a. Saksi 2 melakukan kegiatan pengawasan di kantor KPU Kota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No.119 A, Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
 - b. Dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB terdapat 14 Parpol dan 2 tim kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah mengirimkan

berkas LPSDK ke Kantor KPU Kota Pasuruan.

4) Uraian jawaban Terlapor

Terlapor tidak hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dan kedua sehingga tidak memberikan keterangan tanggapan.

5) Bukti-bukti Terlapor

Terlapor tidak hadir dalam persidangan dan tidak membawa alat bukti dari pihak Terlapor.

6) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan namun tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor.

7) Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa Penemu/Pelapormelengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan temuan dugaan Pelanggaran pada tanggal 11 Januari 2019 dan melaporkan di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Januari 2019.
3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU KotaPasuruan.
4. Bahwa terlapor telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.
5. Dari pihak KPU KotaPasuruan telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
6. Bahwa KPU KotaPasuruan telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyeteran LPSDK tersebutsampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1,





- disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
 3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
 4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
 5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;
 - a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Teguran tertulis;

- c) Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
6. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;
7. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:
- Pasal 43
- (1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kota/Kota.
- (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah Kota/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kota/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kota/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
- a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP



Kota/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan

2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kota/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kota/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan

b. Naskah asli elektronik (softcopy).

- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- (7) (Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

- (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kota/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kota/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.



- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan LPSDK;;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan terhadap Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan KPU Kota Pasuruan untuk menerima penyerahan LPSDK Terlapor paling lama 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kota Pasuruan mengawasi putusan ini dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor, tetap terlampir pada berkas laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai

Anggota Majelis Pemeriksa,6) Eka Rahmawati, S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto S.E.